AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam, 6(2), 2026: 169-184
doi: 10.36701/al-khiyar.v6i1.3759

AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam

Journal homepage: **https://journal.stiba.ac.id/index.php/khiyar/index**

Analisis Model Evaluasi CIPP dalam Program Santripreneur untuk Pemberdayaan Ekonomi di BAZNAS Kabupaten Pekalongan

Analysis of the CIPP Evaluation Model in the Santripreneur Program for Economic Empowerment at Baznas in Pekalongan Regency

Yola Apriliani[a], **Nurul Maisyal**[b]

[a] *UIN K.H. Abdurrahman Wahid, Pekalongan, Indonesia; Email: yola.apriliani@mhs.uingusdur.ac.id*
[b] *UIN K.H. Abdurrahman Wahid, Pekalongan, Indonesia; Email: nurulmaisyal@uingusdur.ac.id*

ARTICLE INFO

Article history:

Received: 29 September 2026
Revised: 31 October 2026
Accepted: 03 November 2026
Published: 13 November 2026

Keywords:
CIPP Evaluation, Santripreneur, Economic Empowerment, BAZNAS of Pekalongan Regency, Program Sustainability

ABSTRACT

Economic inequality remains a challenge in Pekalongan Regency, while Islamic boarding school students (santri) and alumni possess entrepreneurial potential that can be developed to support economic empowerment. BAZNAS of Pekalongan Regency addresses this issue through the Santripreneur Program, which includes entrepreneurship training, business proposal competitions, capital assistance, and business mentoring. This study aims to analyze the implementation of the CIPP (Context, Input, Process, Product) evaluation model in the Santripreneur Program and examine its sustainability as an economic empowerment strategy. This field research employs a descriptive qualitative approach. Data were collected through observation, interviews with BAZNAS administrators and program participants, and document analysis. Data analysis involved data reduction, data presentation, and conclusion drawing, with findings categorized according to the four CIPP components. The findings indicate that, in the context component, the program has clear objectives and target groups; however, its target of 40 participants was not achieved, as only 28 participants joined, partly due to difficulties in preparing business proposals. In the input component, human resources, facilities, business capital, and program regulations were available, although budget planning was not fully adjusted to the actual number of participants and mentoring personnel remained limited. In the process component, implementation was structured, but mentoring was delayed due to staff shortages. In the product component, some businesses experienced improvements in production, orders, income, and innovation, while others showed limited progress. Program sustainability has emerged but remains uneven, influenced by business characteristics, marketing, operational conditions, and mentoring. This study highlights the importance of examining the relationship between resource readiness, mentoring implementation, business outcomes, and the sustainability of participants' enterprises in evaluating economic empowerment programs.

ABSTRAK

Ketimpangan ekonomi di Kabupaten Pekalongan masih menjadi persoalan, sementara santri dan alumni pesantren memiliki potensi kewirausahaan yang dapat dikembangkan sebagai bagian dari pemberdayaan ekonomi. BAZNAS Kabupaten Pekalongan merespons kondisi tersebut melalui program santripreneur yang mencakup pelatihan kewirausahaan, kompetisi proposal, bantuan modal, serta pendampingan usaha. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi evaluasi CIPP (*Context*, *Input*, *Process*, *Product*) dalam program santripreneur dan menganalisis keberlanjutannya sebagai strategi pemberdayaan ekonomi. Penelitian menggunakan *field research* dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui

observasi, wawancara, dan dokumentasi dari pengelola BAZNAS, peserta program, serta dokumen. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan mengategorikan temuan berdasarkan empat komponen CIPP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada aspek *context*, program memiliki latar belakang, tujuan, dan sasaran yang jelas, tetapi target 40 peserta belum tercapai karena 28 peserta yang mengikuti program dan sebagian calon peserta mengalami kesulitan menyusun proposal. Pada aspek *input*, sumber daya manusia, sarana, penyediaan modal usaha, dan aturan telah tersedia, meskipun perencanaan anggaran belum sepenuhnya menyesuaikan jumlah peserta dan sumber daya pendamping masih terbatas. Pada aspek *process*, pelaksanaan program telah terstruktur, tetapi pendampingan mengalami keterlambatan karena keterbatasan pendamping. Pada aspek *product*, sebagian usaha mengalami peningkatan produksi, pesanan, pendapatan, dan inovasi, sedangkan sebagian lainnya belum berkembang. Keberlanjutan program terbentuk, tetapi belum merata karena dipengaruhi karakteristik usaha, pemasaran, operasional, dan pendampingan. Penelitian ini menunjukkan bahwa evaluasi program pemberdayaan ekonomi dengan model CIPP perlu memperhatikan keterkaitan antara kesiapan sumber daya, pelaksanaan pendampingan, capaian usaha, dan keberlanjutan perkembangan usaha peserta.

***How to cite*:**
Yola Apriliani, Nurul Maisyal, "Analisis Model Evaluasi CIPP dalam Program Santripreneur untuk Pemberdayaan Ekonomi di BAZNAS Kabupaten Pekalongan", *AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam* Vol. 6, No. 2 (2026): 169-184. doi: 10.36701/al-khiyar.v6i1.3759

PENDAHULUAN

Ketimpangan ekonomi dan kesenjangan kesejahteraan masih menjadi persoalan yang nyata di berbagai daerah, termasuk Kabupaten Pekalongan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pekalongan tahun 2025, angka kemiskinan masih mencapai 8,05%.[1] Angka tersebut menunjukkan bahwa persoalan kesejahteraan ekonomi masih memerlukan perhatian melalui upaya pemberdayaan masyarakat. Meskipun demikian, angka kemiskinan tersebut merupakan gambaran kondisi masyarakat secara umum dan tidak secara langsung menunjukkan tingkat kemiskinan ataupun kebutuhan ekonomi kelompok santri. Oleh karena itu, upaya pemberdayaan ekonomi perlu mempertimbangkan karakteristik dan potensi kelompok sasaran agar program yang diselenggarakan memiliki kesesuaian dengan kebutuhan penerimanya. Salah satu kelompok yang memiliki potensi untuk dikembangkan dalam pemberdayaan ekonomi adalah santri. Hal ini sesuai dengan jumlah pondok pesantren yang cukup banyak di Kabupaten Pekalongan.[2] Keberadaan pondok pesantren tersebut tidak hanya memiliki peran dalam pendidikan keagamaan, tetapi juga menyimpan potensi sumber daya manusia yang dapat dikembangkan dalam bidang ekonomi. Selama ini, sebagian santri ketika lulus dari pesantren lebih memilih melanjutkan aktivitasnya dalam bidang keagamaan, seperti mengajar di lembaga pendidikan Islam, mengajar TPQ, maupun terlibat dalam kegiatan keagamaan di masyarakat.[3] Kondisi tersebut menunjukkan adanya

[1] Badan Pusat Statistik Kabupaten Pekalongan, "Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Pekalongan (Persen), 2025" *pekalongankab.bps.go.id*, 17 November 2025, https://pekalongankab.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTAyIzI=/persen-penduduk-miskin-p0-.html, diakses pada 16 April 2026.

[2] Badan Pusat Statistik Kabupaten Pekalongan, "Banyaknya Pondok Pesantren, Santri, dan Ustadz Menurut Kecamatan, 2022" *pekalongankab.bps.go.id*, 13 Juni 2024, https://pekalongankab.bps.go.id/id/statistics-table/2/Mjg0IzI=/number-of-islamic-boarding-schools--santri-and-ustadz-by-district.html, diakses pada 16 April 2026.

[3] Abdul Aziz, Kepala Bagian Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan serta Penanggung Jawab Program Santripreneur, *Wawancara Pribadi*, Pekalongan, 10 Juli 2026

ruang untuk mengembangkan alternatif kegiatan ekonomi melalui kewirausahaan. Pengembangan kegiatan usaha pada umumnya memerlukan dukungan berupa peningkatan keterampilan pengelolaan usaha, akses terhadap permodalan, serta pendampingan agar kegiatan usaha dapat dikembangkan secara berkelanjutan.

Sebagai salah satu bentuk upaya pemberdayaan ekonomi, BAZNAS Kabupaten Pekalongan menyelenggarakan program santripreneur pada tahun 2025. Program ini secara khusus menyasar santri atau alumni pondok pesantren yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Pekalongan dan menyediakan kuota sebanyak 40 peserta. Selain itu, bidang usaha yang dikembangkan mencakup industri kreatif, kuliner, dan pertanian.[4] Penetapan sasaran ini menunjukkan bahwa program tidak hanya diarahkan kepada masyarakat umum, tetapi secara khusus memberikan ruang pemberdayaan ekonomi bagi kelompok santri atau alumni pondok pesantren.[5] BAZNAS Kabupaten Pekalongan berupaya memberikan bekal pengetahuan, dukungan modal, dan pendampingan agar santri atau alumni memiliki alternatif pengembangan ekonomi secara mandiri, produktif, dan sesuai dengan prinsip syariah.[6] Meskipun demikian, ketersediaan data mengenai kondisi awal program masih terbatas, terutama terkait kondisi ekonomi seluruh peserta dan pemetaan sistematis kebutuhan usaha sebelum program dilaksanakan.

Di sisi lain, program santripreneur yang dirancang sebagai program produktif, masih menghadapi beberapa kendala, seperti ketidakmampuan sebagian peserta dalam mempertahankan usaha setelah masa pendampingan berakhir.[7] Hal tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program belum berjalan secara menyeluruh dan maksimal. Beberapa peserta menghadapi kendala pada aspek manajemen usaha, kompetensi amil yang masih terbatas, serta minimnya pendampingan jangka panjang yang menyebabkan keberlanjutan usaha peserta tidak terpantau dengan baik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program perlu dilihat secara menyeluruh, tidak hanya dari kegiatan pelatihan dan pemberian modal saja, tetapi juga dari kesesuaian kebutuhan peserta, sumber daya yang tersedia, proses pelaksanaan, serta hasil dan keberlanjutan usaha peserta. Berdasarkan kondisi tersebut, evaluasi diperlukan untuk mengetahui bagaimana program santripreneur dilaksanakan dan sejauh mana setiap komponen program telah berjalan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Model evaluasi CIPP (*Context, Input, Process, Product*) digunakan untuk menganalisis program melalui empat komponen, yaitu *context* yang melatarbelakangi program, *input* yang mendukung pelaksanaan, *process* pelaksanaan program, serta *product* atau hasil yang dicapai.[8]

Masalah yang dikaji dalam penelitian ini dirumuskan dalam dua pertanyaan, yaitu: (1) bagaimana implementasi model evaluasi CIPP dalam program santripreneur untuk pemberdayaan ekonomi di BAZNAS Kabupaten Pekalongan? (2) bagaimana keberlanjutan program santripreneur yang dijadikan salah satu strategi pemberdayaan ekonomi di BAZNAS Kabupaten Pekalongan? Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis implementasi model evaluasi CIPP dalam program santripreneur untuk pemberdayaan ekonomi di BAZNAS

[4] Abdul Aziz, *Wawancara Pribadi*, Pekalongan, 10 Juli 2026

[5] BAZNAS Kabupaten Pekalongan, "Dibuka Pendaftaran Program Santripreneur Baznas Kabupaten Pekalongan 2025, *kabpekalongan.baznas.go.id*, 11 Agustus 2025, https://kabpekalongan.baznas.go.id/berita/news-show/dibuka-pendaftaran-program-santripreneur-baznas-kabupaten-pekalongan-2025/24023, diakses pada 29 Oktober 2026

[6] Abdul Aziz, *Wawancara Pribadi*, Pekalongan, 10 Juli 2026

[7] Abdul Aziz, *Wawancara Pribadi*, Pekalongan, 10 Juli 2026

[8] Daniel L. Stufflebeam dan Guili Zhang, *The CIPP Evaluation Model: How to Evaluate for Improvement and Accountability* (New York: Guilford Press, 2017).

Kabupaten Pekalongan. (2) menganalisis keberlanjutan program santripreneur yang dijadikan salah satu strategi pemberdayaan ekonomi di BAZNAS Kabupaten Pekalongan.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian dilaksanakan di BAZNAS Kabupaten Pekalongan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer didapat dari program santripreneur BAZNAS Kabupaten Pekalongan yang berasal dari para informan yang terlibat secara langsung dalam kegiatan program tersebut. Informan meliputi *staf* BAZNAS dan peserta santripreneur BAZNAS Kabupaten Pekalongan. Sedangkan data sekunder didapat dari beberapa dokumen, catatan, maupun laporan program santripreneur baik yang dipublikasikan maupun tidak dipublikasikan.

Informan dalam penelitian ini sejumlah delapan orang, terdiri atas tiga *staf* BAZNAS dan lima peserta santripreneur. Pemilihan informan dipilih dengan menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu penentuan informan berdasarkan pertimbangan kesesuaian dengan tujuan penelitian. *Staf* BAZNAS dipilih berdasarkan keterlibatan langsung dalam pengelolaan dan pelaksanaan program, yaitu kepala bagian bidang pendistribusian dan pendayagunaan sekaligus sebagai penanggung jawab program, anggota bidang pendistribusian dan pendayagunaan, serta kepala bagian pengumpulan yang bertugas dalam penghimpunan dana program. Adapun peserta dipilih berdasarkan status sebagai penerima bantuan program dengan variasi usaha. Lima peserta dipilih untuk menggambarkan variasi usaha, bukan untuk mewakili seluruh peserta. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Tahap pertama wawancara dilaksanakan di BAZNAS Kabupaten Pekalongan pada 4 Maret-10 Juli 2026, dengan rentang waktu sekitar empat bulan. Kemudian tahap kedua dilaksanakan pada 18-19 September 2026 selama dua hari melalui wawancara dengan peserta santripreneur.

Analisis data dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi, mengelompokkan, dan mengategorikan yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dokumentasi ke dalam empat komponen model evaluasi CIPP, yaitu *context*, *input*, *process*, dan *product*. Pada komponen *context*, analisis difokuskan pada latar belakang, tujuan, kekuatan dan kelemahan program, serta target peserta. Pada komponen *input*, analisis diarahkan pada sumber daya manusia, sarana prasarana, penyediaan modal, prosedur, dan aturan program. Pada komponen *process*, analisis dilakukan terhadap pelaksanaan kegiatan, dan pendampingan. Sementara itu, pada komponen *product*, analisis difokuskan pada hasil program. Adapun keberlanjutan usaha dianalisis secara terpisah untuk menganalisis kondisi usaha peserta setelah program dilaksanakan. Selanjutnya, data disajikan secara deskriptif dengan menghubungkan temuan antarkomponen untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai pelaksanaan dan hasil evaluasi program santripreneur. Kemudian penarikan kesimpulan, peneliti menginterpretasikan temuan dengan mempertimbangkan keterkaitan antara konteks program, sumber daya yang tersedia, proses pelaksanaan, dan hasil yang diperoleh. Keabsahan data diperiksa melalui triangulasi sumber, yang melibatkan perbandingan keterangan wawancara *staf* BAZNAS, peserta, dan dokumen, serta triangulasi teknik, yaitu membandingkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan memastikan bahwa kesimpulan disusun berdasarkan data yang saling mendukung.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas pemberdayaan ekonomi melalui program santripreneur, pendayagunaan zakat produktif, dan evaluasi program menggunakan model CIPP. Pertama, skripsi berjudul “Manajemen Dana Zakat, Infaq dan

Sedekah Melalui Program Santripreneur untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat di BAZNAS Kabupaten Pekalongan" yang ditulis oleh Atina Nur Amilah.[9] Penelitian ini memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui tentang bagaimana Manajemen Dana Zakat, Infaq Dan Sedekah Melalui Program Santripreneur Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat Di Baznas Kabupaten Pekalongan. Hasil dari penelitiannya, menunjukkan bahwa BAZNAS Kabupaten Pekalongan telah menerapkan fungsi-fungsi manajemen dalam rapat kerja anggaran tahunan (RKAT) dan langkah-langkah perencanaan lainnya meliputi penetapan sasaran penerima bantuan, kriteria mustahik, alokasi dana, survei kepada mustahik, sampai dengan penyaluran bantuan.

Kedua, skripsi berjudul "Evaluasi Pendayagunaan Zakat Produktif pada Program Z-Chicken dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Mustahik Dengan Model CIPP (Studi Kasus Baznas Kota Tangerang)" yang ditulis oleh Siti Amelia Putri.[10] Penelitian ini memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui keberhasilan program dalam meningkatkan kemandirian ekonomi penerima manfaat dengan menggunakan model evaluasi CIPP serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model evaluasi CIPP dalam program Z-Chicken BAZNAS Kota Tangerang sesuai dengan kebutuhan mustahik, didukung modal, pelatihan, dan pendampingan, serta berjalan cukup baik. Namun, keterbatasan kompetensi, konsistensi usaha, dan persaingan di sektor kuliner masih menjadi kendala yang memengaruhi keberlanjutan usaha penerima manfaat.

Ketiga, jurnal berjudul "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Zakat Produktif BAZNAS Lampung Utara dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat" yang ditulis oleh Nurlaili Yusna, M. Saifuddin, dan Faizal.[11] Penelitian ini memiliki tujuan untuk memberikan gambaran mengenai pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan dana sosial zakat sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan. Hasil penelitian menunjukkan perubahan tersebut terlihat dari adanya peningkatan status penerima bantuan yang sebelumnya berperan sebagai penerima manfaat menjadi donatur.

Keempat, jurnal berjudul "Evaluasi Program Cirebon Sejahtera Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Mustahik (Studi Baznas Kabupaten Cirebon)" yang ditulis oleh Karimah Nenoliu dan Rahmatul Fadhil.[12] Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengevaluasi program tersebut dengan menggunakan model evaluasi CIPP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program telah sesuai dengan prinsip syariah dan kebutuhan mustahik, tetapi pendampingan yang belum merata menyebabkan perkembangan usaha mustahik kelompok lebih baik dibandingkan mustahik individu.

Kelima, jurnal berjudul "Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Pondok Pesantren Melalui Program Santripreneur di Pondok Pesantren" yang ditulis oleh Budimansyah dan Diah Mukminatul Hasyimi.[13] Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis

[9] Atina Nur Amilah. "Manajemen Dana Zakat, Infaq dan Sedekah Melalui Program Santripreneur untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat di BAZNAS Kabupaten Pekalongan" *Skripsi* (UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan 2024).

[10] Siti Amelia Putri. "Evaluasi Pendayagunaan Zakat Produktif pada Program Z-Chicken dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Mustahik dengan Model CIPP" *Skripsi* (Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, 2025).

[11] N.Yusna, & M. Saifuddin, "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Zakat Produktif BAZNAS Lampung Utara dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat", *SYARIKAT: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah 7*, no. 7 (2024). 123–133. https://doi.org/10.25299/syarikat.2024.vol7(1).16240

[12] K. Nenoliu, R. Fadhil, "Evaluasi Program Cirebon Sejahtera Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Mustahik (Studi Baznas Kabupaten Cirebon)", *Al-Mi'thoa: Jurnal Zakat Dan Wakaf 3*, no. 1, (2025): 72–85.

[13] Budimansyah, Diah Mukminatul Hasyimi, "Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Pondok Pesantren melalui Program Santripreneur di Pondok Pesantren," *Jurnal Ilmiah Edunomika* 8, no. 4 (2024): 1–8, https://doi.org/10.29040/jie.v8i4.15147

pemberdayaan ekonomi berbasis pesantren melalui program santripreneur dalam meningkatkan kemandirian ekonomi pesantren dan santri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program ini mendorong kemandirian melalui pengembangan unit usaha yang dikelola santri, sekaligus meningkatkan pendapatan pesantren dan keterampilan kewirausahaan santri.

Penelitian terdahulu menunjukkan adanya kajian mengenai manajemen program santripreneur, evaluasi program pemberdayaan zakat dengan model CIPP, pemberdayaan ekonomi melalui zakat produktif, serta pemberdayaan ekonomi berbasis pesantren melalui santripreneur. Namun, penelitian Atina Nur Amilah berfokus pada manajemen dana zakat, infak, dan sedekah dalam program santripreneur di BAZNAS Kabupaten Pekalongan. Penelitian Siti Amelia Putri dan Karimah Nenoliu bersama Rahmatul Fadhil menggunakan model CIPP, tetapi masing-masing mengkaji objek program yang berbeda, yaitu Z-Chicken BAZNAS Kota Tangerang dan Program Cirebon Sejahtera BAZNAS Kabupaten Cirebon. Penelitian Nurlaili Yusna, M. Saifuddin, dan Faizal mengkaji pada aspek pemberdayaan ekonomi melalui pemanfaatan dana zakat, tetapi tidak secara khusus membahas program santripreneur maupun menggunakan model evaluasi CIPP. Sementara itu, penelitian Budimansyah dan Diah Mukminatul Hasyimi membahas program santripreneur dalam konteks pemberdayaan ekonomi berbasis pondok pesantren.

Berdasarkan penelitian di atas, belum terlihat penelitian yang secara khusus menganalisis program Santripreneur BAZNAS Kabupaten Pekalongan menggunakan model evaluasi CIPP dengan mengkaji komponen *Context, Input, Process,* dan *Product* serta mengaitkannya dengan keberlanjutan program sebagai salah satu strategi pemberdayaan ekonomi umat. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk mengisi ruang tersebut dengan menganalisis pelaksanaan program secara menyeluruh berdasarkan empat komponen CIPP sekaligus melihat keberlanjutan program santripreneur di BAZNAS Kabupaten Pekalongan.

PEMBAHASAN

Model Evaluasi CIPP

Model evaluasi CIPP merupakan model evaluasi program yang pertama kali dikenalkan oleh Daniel L. Stufflebeam sejak pertengahan 1960-an dan disempurnakan bersama Shinkfield serta Guili Zhang. CIPP merupakan singkatan dari *context* (konteks), *input* (masukan), *process* (proses), *product* (hasil), yang menggambarkan empat komponen dalam evaluasi. Model ini digunakan untuk memperoleh informasi yang komprehensif mengenai suatu program dengan tidak hanya menganalisis hasil akhirnya tetapi juga mempertimbangkan konteks di mana program tersebut berjalan, sumber daya yang digunakan, serta proses pelaksanaannya.[14] Model CIPP pada dasarnya berfokus pada penyediaan informasi yang dapat membantu proses pengambilan keputusan. Komponen *context* digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan, tujuan, serta kekuatan dan kelemahan program. Komponen yang kedua yaitu *input* digunakan untuk menilai sumber daya yang tersedia, sarana prasarana, serta prosedur dan aturan program. Selanjutnya yang ketiga komponen *process* digunakan untuk mengkaji pelaksanaan dan

[14] Y. Pedhu, "Model Evaluasi Context, Input, Process dan Product: Hakikat dan Penerapannya dalam Bimbingan dan Konseling," *Psiko Edukasi* 20, no. 1 (2022): 53–64, https://doi.org/10.25170/psikoedukasi.v20i1.3420

kendala program, dan yang terakhir yaitu komponen *product* digunakan untuk menentukan hasil yang dicapai.[15]

Empat aspek dalam model evaluasi CIPP yaitu *context*, *input*, *process*, dan *product* dapat digunakan sebagai dasar bagi pengambil keputusan dalam menentukan arah suatu program. Keempat aspek tersebut membantu menjawab empat pertanyaan utama dalam proses evaluasi, yaitu meliputi:

1. Apa yang harus dilakukan (*What should we do*?)

Tahap ini berkaitan dengan identifikasi kebutuhan (*need assessment*) melalui proses pengumpulan analisis informasi. Hasil analisis tersebut digunakan untuk menentukan tujuan, prioritas, dan sasaran.

2. Bagaimana kita melaksanakannya (*How should we do it*?)

Tahap ini berhubungan dengan penentuan sumber daya serta strategi atau langkah yang dibutuhkan agar tujuan dan sasaran program dapat tercapai.

3. Apakah dikerjakan sesuai rencana (*Are we doing it as planned*?)

Tahap ini memberikan gambaran kepada pengambil keputusan mengenai tingkat kesesuaian antara pelaksanaan program dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Monitoring secara berkelanjutan memungkinkan pengambil keputusan mengetahui perkembangan pelaksanaan program, kesesuaian dengan pedoman, berbagai kendala atau konflik yang muncul, kondisi serta dukungan tenaga pelaksana, kekuatan dan keterbatasan sarana yang digunakan, hingga persoalan yang berkaitan dengan anggaran.

4. Apakah berhasil (*Did it work*?)

Tahap terakhir ini berkaitan dengan hasil atau *outcome* program. Informasi tersebut menjadi dasar bagi pengambil keputusan dalam menentukan keberlanjutan program, melakukan perubahan atau penyempurnaan, maupun menghentikan program apabila hasil yang dicapai tidak sesuai dengan yang diharapkan.[16]

Implementasi Model Evaluasi CIPP dalam Program Santripreneur untuk Pemberdayaan Ekonomi di BAZNAS Kabupaten Pekalongan

1. Evaluasi *Context*

Evaluasi *context* merupakan aspek pertama dari model evaluasi CIPP, yang berfungsi untuk mengidentifikasi kondisi-kondisi yang mendasari suatu program. Evaluasi ini mencakup penilaian terhadap latar belakang, tujuan, kekuatan, kelemahan, dan target peserta.[17]

Program santripreneur BAZNAS Kabupaten Pekalongan dilatarbelakangi oleh kondisi santri dan alumni pondok pesantren yang setelah menyelesaikan pendidikan cenderung melanjutkan aktivitas pada bidang pendidikan dan keagamaan, seperti menjadi guru sekolah, guru TPQ, maupun terlibat dalam kegiatan keagamaan di masyarakat. Kondisi tersebut menjadi dasar bagi BAZNAS Kabupaten Pekalongan untuk menyediakan alternatif pengembangan ekonomi melalui bidang kewirausahaan. Hal tersebut menunjukkan bahwa program tidak hanya diarahkan untuk memberikan bantuan kepada kelompok yang membutuhkan, tetapi juga berupaya membangun kapasitas ekonomi kelompok sasaran melalui program produktif.

[15] A. Rama et al., "Konsep Model Evaluasi Context, Input, Process dan Product (CIPP) di Sekolah Menengah Kejuruan," *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)* 8, no. 1 (2023): 82–86, https://doi.org/10.29210/30032976000

[16] Rusydi Ananda, Tien Rafida, *Pengantar Evaluasi Program Pendidikan* (Medan: Perdana Publishing, 2017), 45.

[17] Zetri Rahmat, Ambiyar, "The CIPP Evaluation Model in School Programs: A Systematic Literature Review," *JKIP: Jurnal Kajian Ilmu Pendidikan* 5, no. 4 (2025): 911–919, https://doi.org/10.55583/jkip.v5i4.1170

Tujuan diwujudkan melalui pemberian pembekalan pengetahuan dan keterampilan kewirausahaan serta solusi bagi santri dalam mempersiapkan diri untuk menghadapi perkembangan zaman yang semakin kompleks. Sekaligus memberikan manfaat kepada masyarakat sekitar dengan santri yang berdaya dalam wirausaha mampu menciptakan lapangan pekerjaan. Tujuan yang dikemukakan oleh penanggung jawab program yaitu mengubah status peserta dari *mustahik* menjadi *muzakki*, atau minimal menjadi *munfiq*.[18] Status tersebut dipahami sebagai indikator tujuan jangka panjang, bukan satu-satunya keberhasilan program. Dengan demikian, tujuan program santripreneur memiliki keterkaitan dengan pemberdayaan ekonomi karena peserta diarahkan untuk meningkatkan kapasitasnya sebagai pelaku usaha, bukan hanya sebagai penerima bantuan.

Sasaran program santripreneur juga telah ditentukan secara spesifik, yaitu santri atau alumni pondok pesantren yang memiliki KTP Kabupaten Pekalongan dan berstatus mustahik. Penetapan sasaran tersebut menunjukkan bahwa BAZNAS telah menghubungkan karakteristik kelompok sasaran dengan tujuan program. Hal ini menjadi penting karena ketepatan sasaran merupakan bagian dari kesesuaian tujuan program. Dalam hal ini, program santripreneur memiliki karakteristik yang berbeda dengan program pemberdayaan BAZNAS Kabupaten Pekalongan lainnya karena secara khusus diarahkan kepada santri atau alumni pondok pesantren.

Meskipun memiliki sasaran yang jelas, hasil penelitian menemukan adanya kelemahan dalam proses seleksi peserta, khususnya pada penyusunan proposal usaha. Program santripreneur ini menggunakan sistem kompetisi yang mengharuskan calon peserta menyusun proposal usaha sebagai bagian dari proses seleksi. BAZNAS Kabupaten Pekalongan telah menyediakan contoh atau template laporan proposal, tetapi sebagian peserta masih mengalami kesulitan dalam menyusunnya. Hal ini didasarkan pada tidak adanya sosialisasi atau bimbingan pelatihan dalam penyusunan proposal usaha. Selain itu, tidak semua peserta berpengalaman dalam penulisan dan mengoperasikan laptop atau komputer. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persyaratan penyusunan proposal belum sepenuhnya diikuti dengan pembekalan teknis bagi calon peserta. Proposal memang menjadi bagian penting dalam proses seleksi karena dapat digunakan untuk melihat gagasan dan kesiapan usaha, tetapi keterbatasan kemampuan dapat menjadi hambatan bagi sebagian calon peserta dalam menyampaikan gagasan usahanya.

Kelemahan lainnya terlihat pada ketercapaian target peserta. BAZNAS Kabupaten Pekalongan menetapkan kuota sejumlah 40 peserta, akan tetapi realisasinya yang mengikuti program hanya berjumlah 28 peserta.[19] Hal ini terjadi meskipun informasi telah disebarkan melalui media sosial, UPZ (Unit Pengumpul Zakat), dan koordinasi dengan Kementerian Agama bagian pondok pesantren, dengan menyurati 120 pondok pesantren di Kabupaten Pekalongan. Selisih antara target dan realisasi tersebut menunjukkan bahwa strategi penyebarluasan informasi belum sepenuhnya menghasilkan jumlah peserta sesuai target. Kondisi ini juga menunjukkan bahwa persoalan ketercapaian peserta tidak hanya berkaitan dengan jangkauan informasi, tetapi dapat berkaitan dengan kesiapan calon peserta dalam memenuhi persyaratan program santripreneur, termasuk penyusunan proposal usaha.

Evaluasi *context* menunjukkan bahwa program santripreneur telah memiliki latar belakang dan tujuan yang berkaitan dengan kebutuhan pengembangan ekonomi santri dan

[18] Abdul Aziz, *Wawancara Pribadi*, Pekalongan, 10 Juli 2026
[19] Abdul Aziz, *Wawancara Pribadi*, Pekalongan, 10 Juli 2026

alumni, serta sasaran yang telah ditentukan secara spesifik. Namun, masih terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan, yaitu kemampuan calon peserta dalam penyusunan proposal dan belum tercapainya target jumlah peserta. Temuan tersebut menunjukkan bahwa perumusan program telah memiliki arah yang jelas, tetapi strategi menjangkau dan mempersiapkan sasaran masih perlu disesuaikan dengan kondisi calon peserta.

2. Evaluasi *Input*

Evaluasi *input* berfokus pada ketersediaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, penyediaan modal, prosedur dan aturan program. Melalui evaluasi ini, pengelola program dapat menentukan sumber daya dan strategi yang paling sesuai dengan kebutuhan program, sehingga memastikan bahwa pelaksanaannya telah dipersiapkan dengan baik.[20] Evaluasi pada tahap ini penting untuk mengetahui apakah sumber daya yang disediakan telah sesuai dengan kebutuhan program dan kelompok sasaran.

Pelaksanaan program santripreneur melibatkan pihak internal dan eksternal BAZNAS Kabupaten Pekalongan. Pihak internal program sebagai pelaksana sekaligus bertugas sebagai pendamping program, yaitu dari *staf* BAZNAS Kabupaten Pekalongan sendiri. Sedangkan pihak eksternal berperan sebagai pemateri dalam pelatihan dan berasal dari beberapa lembaga, yaitu Bapak Hasan Suaidi dari UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Bapak Rektor Ali Imron dari Institut Teknologi dan Sains Nahdlatul Ulama (ITSNU), serta dari Dinas Koperasi (DinKop) Kabupaten Pekalongan. Keterlibatan beberapa pihak menunjukkan bahwa program santripreneur telah memanfaatkan sumber daya dari berbagai lembaga untuk mendukung pelaksanaan kegiatan. Keberadaan pihak eksternal memungkinkan kebutuhan program tidak hanya ditangani oleh BAZNAS Kabupaten Pekalongan, tetapi juga melibatkan pihak yang sesuai dengan kompetensinya.

Dari aspek sarana dan prasarana, program telah menyediakan fasilitas yang mendukung pelaksanaan kegiatan. Hotel Howard Johnson Pekalongan digunakan sebagai lokasi kegiatan, disertai konsumsi dan fasilitas pendukung lainnya. Ketersediaan fasilitas tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan teknis kegiatan telah dipersiapkan sehingga peserta dapat mengikuti kegiatan program dalam kondisi yang mendukung.

Dari sisi pendanaan, sumber dana dibedakan berdasarkan peruntukannya; bantuan modal usaha bersumber dari dana infak, sedangkan kebutuhan operasional kegiatan, seperti tempat dan konsumsi, menggunakan dana zakat dan dialokasikan secara terpisah. BAZNAS menyiapkan alokasi bantuan modal sebesar Rp129.000.000 untuk kuota 40 peserta. Rinciannya adalah juara pertama Rp7.000.000, juara kedua Rp6.000.000, juara ketiga Rp5.000.000, dan 37 peserta lainnya masing-masing Rp3.000.000. Karena peserta yang terealisasi berjumlah 28 orang, bantuan modal yang tersalurkan sebesar Rp93.000.000, terdiri atas Rp18.000.000 untuk tiga peserta terbaik dan Rp75.000.000 untuk 25 peserta lainnya. Dengan demikian, terdapat sisa bantuan modal usaha sejumlah Rp36.000.000 yang tidak tersalurkan karena kuota penerima tidak terpenuhi. Angka Rp129.000.000 merupakan rencana alokasi bantuan modal usaha, bukan total biaya keseluruhan program. Biaya operasional kegiatan tidak termasuk dalam angka tersebut.[21] Besaran bantuan modal usaha menunjukkan bahwa program tidak hanya memberikan modal dalam jumlah yang sama kepada seluruh peserta, tetapi juga memberikan penghargaan tambahan kepada peserta dengan hasil dan presentasi proposal terbaik. Pada

[20] Asyraf Suryadin, et al, *Evaluasi Program Model CIPP (Context, Input, Process, Product) Antara Teori dan Praktiknya* (Yogyakarta: Samudra Biru, 2022), 43.

[21] Ahmad Rifai', Kepala Bagian Pengumpulan, *Wawancara Pribadi*, Pekalongan, 4 Maret 2026

saat yang sama, peserta lain tetap memperoleh bantuan modal sehingga tujuan pemberdayaan tidak sepenuhnya bergantung pada posisi dalam kompetisi. Dengan mekanisme tersebut, kompetisi proposal berfungsi sebagai instrumen seleksi dan penilaian kesiapan usaha, sedangkan bantuan modal diberikan untuk mendukung peserta dalam menjalankan rencana usaha yang telah disusun.

Selain sumber daya manusia dan penyediaan modal, program memiliki prosedur dan aturan mengenai penggunaan bantuan. Peserta diwajibkan menggunakan bantuan untuk kebutuhan yang berkaitan dengan pengembangan usaha serta mempertanggungjawabkan penggunaannya melalui laporan pertanggungjawaban (LPJ). Peserta harus melampirkan nota asli sebagai bukti transaksi dan dokumentasi penggunaan bantuan, seperti foto barang atau peralatan yang dibeli untuk menunjang kegiatan usaha. Adanya ketentuan tersebut menunjukkan bahwa program telah memiliki mekanisme pengendalian penggunaan dana sehingga bantuan tidak hanya diberikan, tetapi juga diarahkan untuk digunakan sesuai dengan tujuan pemberdayaan usaha. Dalam pelaksanaannya, BAZNAS Kabupaten Pekalongan tidak menerapkan sanksi apabila terdapat penggunaan bantuan yang belum sesuai. Penanganan terhadap ketidaksesuaian lebih diarahkan melalui imbauan, teguran, dan pemberian arahan kepada peserta melalui pendampingan usaha.[22]

Berdasarkan evaluasi input, program telah memiliki sumber daya manusia, sarana prasarana, modal usaha, serta prosedur dan aturan yang mendukung pelatihan dan penyaluran bantuan. Namun terdapat dua hal yang perlu diperhatikan. Pertama, perencanaan anggaran belum menyesuaikan realisasi peserta, modal dialokasikan untuk 40 peserta, tetapi hanya 28 peserta yang terealisasi sehingga Rp36 juta tidak tersalurkan. Temuan ini menunjukkan bahwa sumber daya keuangan telah tersedia dan mampu mendukung pelaksanaan program, tetapi perencanaan anggaran belum sepenuhnya menyesuaikan dengan realisasi jumlah penerima bantuan. Dalam perspektif evaluasi *input*, kondisi tersebut perlu diperhatikan agar perencanaan sumber daya pada pelaksanaan berikutnya dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan jumlah peserta di lapangan. Kedua, sumber daya manusia untuk pendampingan peserta bertumpu pada *staf* internal BAZNAS yang sekaligus bertugas sebagai pendamping, kecukupan sumber daya ini baru dapat dinilai pada pelaksanaan program dan dibahas pada evaluasi *process*. Dengan demikian, kesiapan *input* kuat pada tahap pelatihan dan pendanaan, sedangkan kesiapan sumber daya pendampingan masih bertumpu pada *staf* internal BAZNAS. Kondisi ini menjadi dasar untuk melihat bagaimana sumber daya yang telah disediakan digunakan dalam proses pelaksanaan program.

3. Evaluasi *Process*

Evaluasi *process* dilakukan untuk mengetahui bagaimana suatu program dilaksanakan setelah perencanaan dan sumber daya telah ditetapkan. Evaluasi process meliputi pelaksanaan program, pengelolaan peserta, aktivitas pendampingan, serta kendala program.[23] Pada tahap pra-kegiatan, peserta diwajibkan memenuhi sejumlah persyaratan meliputi proposal usaha, surat permohonan, KTP, kartu keluarga, surat keterangan tidak mampu, surat pernyataan mustahik, surat rekomendasi dari pondok pesantren, surat rekomendasi dari masjid atau mushola, foto rumah, dan foto usaha.

Setelah proses seleksi, pelaksanaan program santripreneur dilaksanakan selama tiga hari yang berlokasi di Hotel Howard Johnson Pekalongan pada tanggal 10-12 Oktober 2025, meliputi hari pertama peserta memperoleh materi mengenai *mindset*, ide

[22] Abdul Aziz, Wawancara Pribadi, Pekalongan, 10 Juli 2026
[23] Pedhu, "Model Evaluasi Context, Input, Process dan Product," 59.

bisnis, serta perencanaan dan manajemen usaha. Hari kedua dibekali materi manajemen produksi, manajemen pemasaran, serta branding produk. Sedangkan hari ketiga digunakan untuk pelaksanaan audisi presentasi proposal usaha. Pada tahap tersebut, peserta mempresentasikan proposal usaha yang telah disusun untuk kemudian dinilai oleh juri.[24] Tahapan kegiatan tersebut memperlihatkan bahwa pelaksanaan program mencakup pembekalan materi kewirausahaan dan penilaian proposal usaha peserta. Meskipun demikian, pembekalan materi tersebut belum dapat dijadikan bukti langsung bahwa kualitas pelatihan telah memenuhi kebutuhan peserta atau bahwa seluruh materi telah dipahami dan diterapkan. Menurut staf Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan peserta antusias dalam mengikuti rangkaian pelatihan yang diselenggarakan.[25] Hasil penilaian proposal kemudian direkapitulasi untuk menentukan peringkat peserta dalam kompetisi. Pengumuman dilakukan melalui website dan media sosial Instagram BAZNAS Kabupaten Pekalongan, sedangkan pendistribusian bantuan dilaksanakan bertepatan dengan momentum Hari Santri Nasional. Tahapan tersebut memperlihatkan bahwa pelaksanaan program telah memiliki alur yang jelas mulai dari proses seleksi hingga distribusi bantuan.

Program kemudian dilanjutkan dengan pendampingan usaha. Pendampingan menjadi tahap penting untuk melihat penggunaan modal usaha oleh peserta setelah pelatihan. Pada awal pelaksanaan program santripreneur, BAZNAS Kabupaten Pekalongan merencanakan pendampingan usaha dimulai dua minggu setelah program selesai. Namun, dalam pelaksanaannya, pendampingan baru dimulai pada Februari hingga Juli 2026. Keterlambatan tersebut berkaitan dengan keterbatasan sumber daya manusia dari pihak internal staf BAZNAS untuk melakukan pendampingan kepada peserta. Setelah dua minggu pascaprogram, BAZNAS kemudian membuka rekrutmen tenaga pendamping sebanyak dua orang. Namun, pendamping yang tersedia juga menangani program lain seperti Z-Chicken, Z-Auto, dan Z-Mart. Beban pendampingan yang terbagi pada beberapa program membatasi intensitas pendampingan kepada peserta santripreneur. Pada akhirnya, pendampingan lebih sering dilakukan melalui WhatsApp karena jumlah pendamping ternyata masih belum mencukupi. Perbedaan antara rencana dan realisasi tersebut menjadi salah satu temuan penting dalam evaluasi *process*. Program telah merancang adanya pendampingan setelah kegiatan, tetapi kesiapan tenaga pendamping belum tersedia pada waktu yang direncanakan. Akibatnya, terdapat jeda antara pemberian bantuan dan aktivitas monitoring. Padahal, masa setelah pemberian bantuan merupakan tahap penting untuk mengetahui apakah bantuan benar-benar digunakan untuk mengembangkan usaha dan untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi peserta.

Dengan demikian, evaluasi *process* menunjukkan bahwa pelaksanaan program santripreneur telah memiliki tahapan yang terstruktur, mulai dari seleksi peserta, pelatihan, presentasi proposal, penetapan penerima bantuan, hingga pendampingan. Namun, proses pelaksanaan masih menghadapi kendala seperti keterbatasan jumlah pendamping yang menyebabkan keterlambatan pendampingan sehingga hal ini perlu diperbaiki. Penguatan sumber daya pendamping sejak awal program perlu menjadi perhatian penting agar proses pemberdayaan tidak berhenti pada pelatihan dan penyaluran bantuan.

4. Evaluasi *Product*

[24] Genta Haru Purwanto, Peserta Program Santripreneur, *Wawancara Pribadi*, Pekalongan, 18 September 2026
[25] Ahmad Zada Naf'an, Staff Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, *Wawancara Pribadi*, Pekalongan, 10 Juli 2026

Evaluasi *product* yaitu tahap yang digunakan untuk menentukan sejauh mana pencapaian hasil dari suatu program serta memastikan seberapa besar program telah memenuhi kebutuhan suatu kelompok program yang dilayani.[26] Berdasarkan hasil penelitian, program santripreneur telah menghasilkan rangkaian kegiatan pemberdayaan yang mencakup pembekalan materi kewirausahaan dan pemberian bantuan modal. Kedua kegiatan tersebut telah terlaksana sebagai bentuk dukungan awal bagi peserta dalam menjalankan usaha. Namun, pelaksanaan pendampingan masih terbatas sehingga belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan kebutuhan pengembangan usaha peserta.

Setelah mengikuti pelaksanaan program, peserta memperoleh bantuan modal yang dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan usaha masing-masing. Untuk memperoleh informasi mengenai pemanfaatan bantuan modal usaha tersebut, peneliti mengambil lima usaha secara *purposive* dengan didasarkan pada pertimbangan bahwa masing-masing menunjukkan variasi jenis usaha, yaitu tempe crispy, Pizza Upps, Pawon Yusika, open pre-order kaos, dan budidaya ikan lele. Kelima usaha ini dipilih karena memiliki jenis usaha yang berbeda mengenai variasi bidang usaha.

Pada kelima usaha, bantuan modal digunakan untuk pembelian peralatan produksi dan bahan baku, dengan porsi yang berbeda sesuai dengan kebutuhan masing-masing usaha. Pada usaha tempe crispy, bantuan modal digunakan untuk membeli mesin pemotong keripik, laptop, blender, wajan, kompor, alat pres, dan timbangan. Peralatan tersebut berkaitan dengan kebutuhan produksi dan operasional usaha.[27] Sementara itu, peserta usaha Pizza Upps memanfaatkan bantuan untuk membeli alat produksi yaitu oven, loyang dan bahan baku berupa tepung, gula, garam, saus, dan topping yang diperlukan dalam pembuatan produk pizza.[28] Kemudian usaha Pawon Yusika yang memproduksi kerupuk usek dan emping. Bantuan digunakan untuk membeli peralatan berupa wajan serta bahan baku, seperti melinjo dan tepung tapioka.[29] Adapun peserta yang menjalankan usaha kaos dengan sistem *open pre-order* kaos menggunakan bantuan untuk membeli kain, benang, yang dibutuhkan dalam proses produksi.[30] Pada usaha budidaya ikan lele, bantuan modal dimanfaatkan untuk membeli pakan ikan sebagai salah satu kebutuhan operasional pemeliharaan.[31]

Berdasarkan hasil tersebut, evaluasi *product* menunjukkan bahwa program santripreneur telah menghasilkan capaian berupa terlaksananya pembekalan materi kewirausahaan, tersalurkannya bantuan modal, dan dimanfaatkannya bantuan untuk menunjang kebutuhan usaha peserta. Pemanfaatan bantuan pada kelima usaha memperlihatkan bahwa dukungan yang diberikan telah disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing bidang usaha, baik dalam bentuk pengadaan peralatan produksi maupun pembelian bahan baku. Meskipun demikian, ketercapaian program pada aspek tersebut belum dapat sepenuhnya menggambarkan keberhasilan pengembangan usaha peserta. Hal ini karena masih terdapat keterbatasan dalam pendampingan yang diperlukan untuk membantu peserta mengelola dan mengembangkan usahanya. Oleh karena itu, hasil perkembangan usaha setelah memperoleh bantuan serta kemampuan peserta dalam mempertahankan kegiatan ekonominya menjadi bagian penting untuk dikaji lebih lanjut dalam keberlanjutan program.

[26] Suryadin et al., *Evaluasi Program Model CIPP*, 44.
[27] Genta Haru Purwanto, *Wawancara Pribadi*, Pekalongan, 18 September 2026
[28] Lutfi Hakim, *Wawancara Pribadi*, Pekalongan, 19 September 2026
[29] Yustika Fathurohimah, *Wawancara Pribadi*, Pekalongan, 18 September 2026
[30] Muhammad Nurul Majid, *Wawancara Pribadi*, Pekalongan, 19 September 2026
[31] Syahrullah, Peserta Program Santripreneur, Pekalongan, 19 September 2026

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan model evaluasi CIPP dalam program pemberdayaan ekonomi perlu memperhatikan keterkaitan antara setiap komponen evaluasi, bukan hanya menilai ketercapaian masing-masing komponen secara terpisah. Pada program santripreneur, keterbatasan SDM pendamping yang teridentifikasi pada komponen input berkaitan dengan pelaksanaan pendampingan yang mengalami keterlambatan pada komponen process. Kondisi tersebut menjadi salah satu aspek yang perlu dipertimbangkan ketika membaca variasi usaha peserta pada komponen product. Selain itu, penelitian ini memperlihatkan bahwa penilaian hasil program pemberdayaan ekonomi tidak cukup berhenti pada terlaksananya pelatihan, tersalurkannya bantuan, dan pemanfaatan modal, tetapi perlu dilanjutkan dengan penelusuran perkembangan usaha setelah program dilaksanakan. Dengan demikian, penerapan CIPP pada program santripreneur memberikan pemahaman bahwa evaluasi pemberdayaan ekonomi perlu menghubungkan kesiapan sumber daya, pelaksanaan program, capaian usaha, dan keberlanjutan usaha setelah bantuan diberikan.

Keberlanjutan Program Santripreneur yang Dijadikan Salah Satu Strategi Pemberdayaan Ekonomi Umat di BAZNAS Kabupaten Pekalongan

Keberlanjutan program santripreneur dilihat berdasarkan kemampuan peserta mempertahankan dan mengembangkan usaha setelah memperoleh pelatihan serta bantuan modal dari BAZNAS Kabupaten Pekalongan. Penilaian ini tidak hanya melihat apakah usaha masih berjalan, tetapi juga memperhatikan perubahan yang terjadi setelah bantuan digunakan.

Berdasarkan penjelasan di atas, pembahasan berikut dipisahkan menjadi tiga bagian: bukti keberlanjutan yang teramati, faktor yang menghambat, dan kebutuhan penguatan untuk ke depannya.

1. Bukti Keberlanjutan yang Teramati

Keberlanjutan terlihat pada usaha tempe crispy, produksi meningkat dari 5 kg menjadi 10 kg per hari.[32] Kemudian pada usaha Pizza Upps mengalami peningkatan pendapatan dan penambahan variasi produk.[33] Sementara itu, pada usaha Pawon Yusika, jumlah pesanan meningkat, yang menunjukkan usaha memperoleh respons pasar yang lebih baik.[34] Ketiga capaian tersebut menjadi titik awal keberlanjutan. Namun, capaian itu baru dapat disebut berkelanjutan apabila bertahan melampaui periode program, misalnya produksi tempe crispy yang tetap stabil, inovasi Pizza Upps yang terus berjalan, dan pesanan Pawon Yusika yang konsisten. Ketiga usaha tersebut memperlihatkan perkembangan pada aspek produksi, permintaan konsumen, dan variasi produk setelah peserta memperoleh bantuan program.

Namun, perkembangan usaha tidak terjadi secara merata. Usaha kaos dengan sistem *open pre-order* belum menunjukkan perubahan yang signifikan.[35] Demikian pula usaha budidaya lele yang belum mengalami peningkatan penjualan.[36] Kondisi ini menunjukkan bahwa keberlanjutan usaha peserta tidak hanya ditentukan oleh tersalurkannya bantuan modal, tetapi juga berkaitan dengan kemampuan peserta dalam mengelola usaha dan menyesuaikan kegiatan produksinya dengan kebutuhan pasar.

2. Faktor yang Menghambat Keberlanjutan

[32] Genta Haru Purwanto, *Wawancara Pribadi*, Pekalongan, 18 September 2026
[33] Lutfi Hakim, *Wawancara Pribadi*, Pekalongan, 19 September 2026
[34] Yustika Fathurohimah, *Wawancara Pribadi*, Pekalongan, 18 September 2026
[35] Muhammad Nurul Majid, *Wawancara Pribadi*, Pekalongan, 19 September 2026
[36] Syahrullah, Peserta Program Santripreneur, Pekalongan, 19 September 2026

a. Hambatan pada Tingkat Usaha

Usaha tempe crispy masih menghadapi persoalan pada kemasan, daya tahan produk, cita rasa, dan perluasan pemasaran. Usaha *open pre-order* kaos belum menunjukkan perubahan signifikan, dan kendalanya berkaitan dengan kemampuan menjangkau konsumen, dan menentukan strategi promosi. Pada budidaya ikan lele, peserta kesulitan memperoleh benih, sehingga bantuan modal belum menghasilkan peningkatan penjualan.

b. Hambatan pada Tingkat Lembaga

Pendampingan oleh BAZNAS Kabupaten Pekalongan mengalami keterlambatan, dan jumlah pendamping belum sebanding dengan jumlah peserta, sehingga peserta tidak selalu memperoleh dukungan saat menghadapi masalah produksi, pemasaran, maupun perubahan pasar. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberlanjutan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan peserta, tetapi juga oleh kesiapan sistem pendampingan.

3. Penguatan untuk ke Depannya

Berdasarkan analisis terhadap temuan di atas, penulis mengidentifikasi beberapa kebutuhan penguatan.

a. Pendampingan Sesuai Karakteristik Usaha

Pendampingan usaha makanan dapat diarahkan pada kualitas produk, kemasan, pemasaran, dan perluasan pasar. Usaha fesyen dapat berfokus pada pemasaran digital, pengelolaan *pre-order*, dan pengembangan pelanggan. Usaha budidaya perlu penguatan akses terhadap pemasok dan pengelolaan produksi. Untuk usaha *pre-order* kaos, dukungan lanjutan lebih tepat diarahkan pada penguatan pemasaran. Pembagian ini memungkinkan dukungan BAZNAS tertuju pada persoalan yang benar-benar menghambat masing-masing usaha.

b. Penguatan Sistem Pendampingan

Pendampingan perlu dipersiapkan sejak tahap pelaksanaan program, dengan rasio antara jumlah peserta dan pendamping yang lebih seimbang.

Berdasarkan analisis peneliti pada kelima usaha tersebut, keberlanjutan program santripreneur di BAZNAS Kabupaten Pekalongan telah menunjukkan perkembangan awal melalui usaha peserta, meliputi peningkatan produksi, pertambahan pesanan, dan peningkatan pendapatan. Namun, capaian tersebut belum merata dan masih dihadapkan pada kendala teknis usaha dan keterbatasan pendampingan. Oleh karena itu, keberlanjutan program memerlukan penguatan dan dukungan yang sesuai dengan kebutuhan setiap usaha agar hasil pemberdayaan dapat dipertahankan dan berkembang menuju kemandirian ekonomi peserta.

KESIMPULAN

Program santripreneur BAZNAS Kabupaten Pekalongan telah dilaksanakan sebagai upaya pemberdayaan ekonomi santri atau alumni pondok pesantren melalui pelatihan kewirausahaan, pemberian modal usaha, serta pendampingan. Berdasarkan evaluasi CIPP, pada aspek *context*, sasaran program telah ditetapkan secara spesifik, tetapi pemetaan kondisi awal dan kebutuhan usaha belum didokumentasikan secara sistematis. Kuota 40 peserta juga belum tercapai karena realisasi hanya 28 orang, sementara sebagian calon peserta mengalami kesulitan menyusun proposal. Pada aspek input, program telah didukung pelatihan, alokasi bantuan modal, prosedur dan aturan program. Namun, penyediaan modal usaha belum tersalurkan semua karena jumlah peserta masih di bawah kuota, dan kapasitas tenaga pendamping masih terbatas. Pada

aspek process, tahapan seleksi, pelatihan, presentasi proposal, penetapan penerima, dan penyaluran bantuan telah dilaksanakan secara terstruktur. Kendala utama terdapat pada keterlambatan pendampingan karena keterbatasan SDM pendamping. Pada aspek product, telah menghasilkan capaian berupa terlaksananya pembekalan materi kewirausahaan, tersalurkannya bantuan modal, dan dimanfaatkannya bantuan untuk menunjang kebutuhan usaha peserta. Penelusuran terhadap lima usaha menunjukkan hasil yang bervariasi yaitu produksi tempe crispy meningkat, pendapatan dan variasi rasa produk Pizza Upps bertambah, pesanan Pawon Yusika meningkat, sedangkan usaha kaos open pre-order belum dan penjualan budidaya lele belum meningkat.

Keterbatasan penelitian ini mencakup durasi pengamatan yang relatif singkat serta ruang lingkup penelusuran yang hanya melibatkan lima peserta, sehingga belum dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai keberlanjutan seluruh usaha. Selain itu, keterbatasan informasi perkembangan usaha secara berkala karena minimnya pendampingan pada program santripreneur BAZNAS Kabupaten Pekalongan. Kondisi tersebut membatasi penggambaran perkembangan usaha peserta dalam jangka yang lebih panjang. Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa program santripreneur memiliki potensi untuk mendukung pemberdayaan ekonomi secara berkelanjutan, tetapi penguatan pendampingan, dan tindak lanjut program menjadi bagian penting agar hasil pemberdayaan dapat dipertahankan dan dikembangkan lagi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Rusydi, R. Tien, Pengantar Evaluasi Program Pendidikan. Medan: Perdana Publishing, 2017.

Atina Nur Amilah. Manajemen Dana Zakat, Infaq dan Sedekah Melalui Program Santripreneur untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat di BAZNAS Kabupaten Pekalongan. *Skripsi*. Pekalongan: UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2024.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Pekalongan. "Banyaknya Pondok Pesantren, Santri, dan Ustadz Menurut Kecamatan, 2022." *Badan Pusat Statistik Kabupaten Pekalongan*. June 13 2024. https://pekalongankab.bps.go.id/id/statistics-table/2/Mjg0IzI=/number-of-islamic-boarding-schools--santri-and-ustadz-by-district.html diakses pada 16 April 2026.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Pekalongan. "Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Pekalongan (Persen), 2025." *Badan Pusat Statistik Kabupaten Pekalongan*. November 17 2025. https://pekalongankab.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTAyIzI=/persen-penduduk-miskin-p0-.html diakses pada 16 April 2026.

BAZNAS Kabupaten Pekalongan, "DIBUKA PENDAFTARAN PROGRAM SANTRIPRENEUR BAZNAS KABUPATEN PEKALONGAN 2025, *kabpekalongan.baznas.go.id*, 11 Agustus 2025, https://kabpekalongan.baznas.go.id/berita/news-show/dibuka-pendaftaran-program-santripreneur-baznas-kabupaten-pekalongan-2025/24023, diakses pada 29 Oktober 2026

Budimansyah, Diah Mukminatul Hasyimi. "Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Pondok Pesantren melalui Program Santripreneur di Pondok Pesantren." *Jurnal Ilmiah Edunomika* 8, no. 4 (2024): 1–8. https://doi.org/10.29040/jie.v8i4.15147

Nenoliu, K., & Fadhil, R, Evaluasi Program Cirebon Sejahtera Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Mustahik (Studi Baznas Kabupaten Cirebon). *Al-Mi'thoa: Jurnal Zakat Dan Wakaf 3*, no.1, (2025): 72–85.

Pedhu, Y. Model Evaluasi Context, Input, Process Dan Product: Hakikat Dan Penerapannya Dalam Bimbingan Dan Konseling. *Psiko Edukasi* 20, no. 1 (2022): 53-64. https://doi.org/10.25170/psikoedukasi.v20i1.3420

Rahmat, Z., Ambiyar. "The CIPP Evaluation Model in School Programs: A Systematic Literature Review." *JKIP: Jurnal Kajian Ilmu Pendidikan* 5, no. 4 (2025): 911–919. https://doi.org/10.55583/jkip.v5i4.1170

Rama, A., et al. "Konsep Model Evaluasi Context, Input, Process dan Product (CIPP) di Sekolah Menengah Kejuruan." *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)* 8, no. 1 (2023): 82–86. https://doi.org/10.29210/30032976000

Siti Amelia Putri. Evaluasi Pendayagunaan Zakat Produktif pada Program Z-Chicken dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Mustahik dengan Model CIPP. *Skripsi.* Jakarta: Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ), 2025.

Stufflebeam, Daniel L., dan Guili Zhang. The CIPP Evaluation Model: How to Evaluate for Improvement and Accountability. New York: Guilford Press, 2017.

Suryadin, Asyraf, et al. *Evaluasi Program Model CIPP (Context, Input, Process, and Product) antara Teori dan Praktiknya*. Yogyakarta: Samudra Biru, 2022.

Yusna N., & Saifuddin M, *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Zakat Produktif BAZNAS Lampung Utara dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat*. SYARIKAT: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah *7*, no. 1 (2024): 123–133. https://doi.org/10.25299/syarikat.2024.vol7(1).16240